

## PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM TAHUN 1930-1960

Oleh: Novianto Ari Prihatin, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [noviantoari29@gmail.com](mailto:noviantoari29@gmail.com)

### Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Mohammad Natsir tentang etika politik Islam dan implementasinya dalam kehidupan bernegara pada 1930-1960. Makalah ini menggunakan metode historis kritis, yang terdiri dari empat tahap: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Natsir terhadap etika politik Islam dapat dilihat dari 2 hal, yang pertama adalah tentang konsep keenegaraan, dan yang kedua tentang pelaksanaannya terhadap kehidupan negara. Pertama, dalam ranah konsepsi pemikiran, Natsir berpendapat bahwa politik bukanlah tujuan utama dalam Islam, tapi sarana untuk menerapkan hukum Islam di suatu negara. Kedua, mengenai penerapan konsep pemikiran. Natsir adalah salah satu orang yang memelopori pendirian Masyumi sebagai sarana untuk mewujudkan hukum Islam berbasis demokrasi di Indonesia. Natsir juga terlibat dalam dua pemberontakan, yaitu DI / TII dan PRRI. Dalam pemberontakan DI / TII, Natsir berusaha untuk mendamaikan antara pemberontak dan negara melalui negosiasi. Sementara keterlibatan Natsir di PRRI Natsir menjadi sebuah partai yang berusaha menjauhkan Republik Indonesia dari perpecahan dan juga dari ancaman ideologi komunis yang dekat dengan pemerintah.

Kata Kunci: pemikiran, Mohammad, Natsir, Etika, Politik, Islam

### ***THE THOUGHTS OF MOHAMMAD NATSIR ON ISLAMIC POLITICAL ETHIC OF 1930-1960***

#### ***Abstract***

*This paper aimed to know the thoughts of Mohammad Natsir about Islamic political ethics and its implementation in the life of the state in 1930-1960. This paper used critical historical method, which consists of four stages: heuristic, verification, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that Natsir's thoughts on Islamic political ethics can be seen from 2 main points. The first is about the conception of state, and the second concerning its implementation on the life of the state. First, in the realm of concept of thought, Natsir said that politics is not only the of central goal in Islam, but also implementations Islamic law in a country of furthermore the system of the state, he said that Islam did not give a standard form of state administration system. In this case Natsir agreed that democracy is the most feasible system for Muslims. Second, regarding the implementation of the conception of thought. Natsir is one of the people who pioneered the establishment of Masyumi as a means to realize Islamic law which based on democracy in Indonesia. Natsir was also involved in two rebellions, that was DI / TII and PRRI. In the DI / TII rebellion, Natsir attempted to reconcile between rebels and the state by way of negotiations. While Natsir's involvement in PRRI Natsir became a party that tried to keep the Republic of Indonesia from disunity as well as from the threat of communist ideology that is.*

*Key words: Thoughts, Mohammad, Natsir, Islamic, Politic, Ethic*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang *syumul* (menyeluruh), yang di dalamnya terdapat segala hukum kehidupan, termasuk hukum-hukum politik. Secara bahasa, politik yang dalam Arab disebut dengan *as-siyasah* berarti mengelola, mengatur, memerintah, dan melarang sesuatu atau dalam definisi berarti prinsip-prinsip dan seni mengelola persoalan publik. Ibnu Qoyyim mendefinisikan politik sebagai segala aktifitas yang membuat manusia lebih dekat dengan kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, walaupun tidak dibuat oleh Rasul dan tidak pula diturunkan untuknya.<sup>1</sup> Sementara itu Imam Syafii berpendapat bahwa tidak ada politik tanpa syariat, yang memiliki pengertian bahwa politik harus didasarkan pada syariat Islam.<sup>2</sup>

Kajian etika politik bermuara pada pembahasan prinsip-prinsip moralitas politik yang berkaitan dengan norma-norma penyelenggaraan kenegaraan. Menurut Hegel, kajian ini berguna untuk mengkonstruksikan negara sebagaimana mestinya. Fungsi etika politik terbatas secara bertanggung jawab, dalam artian tidak menggunakan ukuran emosi, prasangka, dan apriori. Etika politik menggunakan standar metodologi ilmiah, secara rasional, objektif, dan argumentatif,<sup>3</sup> sementara

itu Islam mengartikan etika politik dengan nama akhlak. Kata akhlak selalu mengandung segi-segi persesuaian dengan *khalqun* serta erat hubungannya dengan *khaliq* dan *makhluk*. Maka dengan pengertian seperti ini dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik secara individu maupun interaksi sosial (bermasyarakat) tidak terlepas dari pengawasan Tuhan.<sup>4</sup>

Etika politik dalam Islam dapat dilihat dari beberapa hal, seperti pengangkatan pemimpin, etika menghadapi pemberontak, pemilihan bentuk dan sistem negara, sikap sebagai politikus, serta urusan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan negara.<sup>5</sup> Inilah yang menjadi pembeda antara etika politik Islam dengan etika politik pada umumnya. Etika politik Islam selalu menggunakan dasar wahyu Tuhan berupa Alquran dan Hadits sebagai pedoman, sehingga ketika seorang pemimpin mengambil keputusan politis, maka ia akan langsung dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Dalam perkembangan sejarah pemikiran Indonesia, Salah satu tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan Islam politik ialah Natsir. Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H, atau tanggal 17 Juli 1908 dari seorang perempuan yang bernama Khadijah. Ayahnya

---

<sup>1</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *At Thuriq Al-Hukmiyyah Fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar Al Hadits, 2002), hlm. 17.

<sup>2</sup> Mohammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 8.

<sup>3</sup> Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 2.

<sup>4</sup> Artani Hasbi, *Musyawah & Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hlm. 59.

<sup>5</sup> Mengenai segala hal yang berkaitan dengan tata pengelolaan negara dalam Islam lihat: Imam Al Mawardi, *Hukum dan Tata Negara Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

bernama Mohammad Idris Sutan Saripado. Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun.<sup>6</sup>

Di kota kelahiran Natsir, terdapat suatu norma berupa *folkways*<sup>7</sup> yang berfungsi mensosialisasikan seorang anak agar hidup mandiri dan menghayati nilai-nilai dasar Islam, melalui adat, dan tidak di surau-surau. Kebiasaan ini dialami Natsir pada saat usianya 8 tahun. Jadi dalam usianya yang masih kecil, Natsir telah tersosialisasi dalam nilai-nilai Islam.<sup>8</sup>

Menurut Zainal Abidin Ahmad, Natsir memandang keterlibatannya secara langsung dalam kekuasaan negara sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya dalam menegakkan Islam. Melalui cara demikianlah hukum-hukum Tuhan tidak hanya keluar dari para alim di mimbar masjid, akan tetapi juga keluar dari pegawai pemerintahan dalam bentuk undang-undang.<sup>9</sup>

Oleh karena itulah peneliti mencoba melakukan kajian mengenai pemikiran Natsir mengenai etika politik Islam pada tahun 1930-1960. Pada rentan waktu itulah Natsir banyak mencurahkan pemikiran dan tenaganya sebagai

upaya untuk menjadikan Islam sebagai pedoman politik di Indonesia. Penelitian ini akan dispesifikasikan terhadap pemikiran Natsir dalam kaitannya dengan etika politik Islam yang selama ini cenderung terfragmentasi dalam tema-tema yang terpisah.

## METODE PENELITIAN

Metode sejarah merupakan suatu proses untuk menguji dan mengkaji kebenaran rekaman sejarah dan peninggalan-peninggalan masa lampau dengan menganalisa secara kritis terhadap data yang ada sehingga menjadi penyajian dan cerita yang dapat dipercaya.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan empat tahapan penelitian. Empat tahapan penelitian yang digunakan pada penelitian ini antara lain: heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Biografi Mohammad Natsir

Mohammad Natsir (yang selanjutnya disebut Natsir) lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di

<sup>6</sup>Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 21.

<sup>7</sup>Koentjaraningrat menyebutkan bahwa yang dimaksud *folkways* adalah norma yang dianggap kurang berat sehingga apabila dilanggar tidak akan ada akibat yang panjang, tetapi, hanya tertawaan, ejekan, atau gunjingan saja oleh warga masyarakat lainnya, *Pengantar Antropolgi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.159-160.

<sup>8</sup> Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2002), hlm.31.

<sup>9</sup> Ahmad Zainal Abidin, *Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia*, (Pematang Siantar, 1946), hlm. 15-16.

<sup>10</sup>Helius Syamsuddin dan Ismaun, *Metodelogi Sejarah*, (Jakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 61.

<sup>11</sup>Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 43.

Kampung Jembatan Berukir, Kenagarian Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.<sup>12</sup> Ia merupakan putra dari pasangan Mohammad Idris Sutan Saripado dan Khadijah.<sup>13</sup> Ayahnya bekerja sebagai pegawai rendahan yang pernah menjadi juru tulis pada kantor *Kontroler* di Maninjau, Alahan Panjang. Natsir memiliki tiga orang saudara kandung, yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun.<sup>14</sup>

Kehidupan masa kecil Natsir juga dipengaruhi oleh basis spiritual yang relatif kokoh dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat Minang secara luas, merupakan modal yang sangat berharga bagi Natsir. Hal itu seperti diartikulasikan dalam perlambang kebudayaan Minangkabau yang Islami: “Adat bersendi syarak, syarak bersendi *Kitabullah*.”<sup>15</sup> Dengan ungkapan itulah, Islam menjadi basis utama orang Minang dalam menghadapi setiap permasalahan. Islam bukan hanya menjadi ajaran ketauhidan dan aqidah namun juga menjadi tolok ukur hukum keseharian Minang.<sup>16</sup>

Dilihat dari pendidikannya, Natsir pernah bersekolah di sSekolah *Gubernemen* dan HIS

Adabiyah Padang. Setelah beberapa bulan dia sekolah, kemudian ia dipindahkan ayahnya untuk sekolah ke HIS Pemerintahan di Solok. Setelah Natsir menyelesaikan sekolah HIS Solok, Natsir kemudian melanjutkan sekolah ke HIS Pemerintahan di Padang dan dapat menamatkan pendidikannya di HIS pada tahun 1923.<sup>17</sup> Setelah menyelesaikan sekolahnya di HIS, Natsir melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah lanjutan yaitu ke *Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs* (MULO) di Padang. Natsir menyelesaikan sekolahnya di MULO pada tahun 1927, setelah itu ia memutuskan untuk berangkat ke Bandung untuk melanjutkan sekolahnya di *Algemene Midlebare School* (AMS) Afelling A di Bandung dengan bekal beasiswa yang didapatnya.<sup>18</sup> Setelah belajar di AMS, Natsir tidak melanjutkan untuk kuliah, melainkan mengajar di salah satu MULO di Bandung dan Natsir mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (Pendis). Natsir menjabat sebagai Direktur Pendis selama sepuluh tahun sejak tahun 1932. Lembaga-lembaga tersebut kemudian berkembang di beberapa daerah Jawa Barat dan Jakarta.<sup>19</sup>

---

<sup>12</sup>Yusuf Abdullah Puar, *Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978), hlm. 1.

<sup>13</sup>Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), hlm. 53

<sup>14</sup>Solihin Salam, *Wajah Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990), hlm. 131.

<sup>15</sup>Mochtar Naim, “Budaya Minangkabau di Era Globalisasi”, *Republika*, 13 Januari 1996.

<sup>16</sup>M. Syarief Afief, “Minangkabau Penghasil Demokrasi, Intelektual Religius dan Figur Antikolonial”, *Panji Masyarakat*, No. 837, 21-31 Agustus 1995, hlm. 20.

<sup>17</sup>Yusuf A. Puar, *op.cit.*

<sup>18</sup>Ajip Rosidi, *Natsir: Sebuah Biografi*, (Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1990), hlm. 154.

<sup>19</sup>Thohir Luth, (1999), *op. cit.*, hlm. 24.

Perkembangan ideologi Natsir banyak dipengaruhi dua organisasi yang berperan penting dalam pembentukan pola pikirnya, yaitu organisasi JIB dan Persatuan Islam (Persis). Awalnya Natsir masuk menjadi anggota *Pandu Nationalite Pavinderij* dari perkumpulan Jong Islamieten Bond (JIB) Padang yang diketuai oleh Sanusi Pane.<sup>20</sup> Organisasi ini mendapat pengaruh intelektual dari Haji Agus Salim. Di organisasi ini, Natsir juga mengenal beberapa tokoh-tokoh nasional seperti Hatta, Prawoto Mangunsasmito, Yusuf Wibisono, Tjokroaminoto, dan Moh. Roem.<sup>21</sup> Di dalam JIB, Natsir sering berdiskusi dengan kawan seusianya. Tujuan organisasi ini adalah untuk; (1) mempelajari dan mendorong hidupnya agama Islam; (2) memupuk dan menumbuhkan simpati terhadap pemeluk agama Islam dan pengikut-pengikutnya di samping toleransi terhadap golongan lain; (3) menyelenggarakan kursus agama Islam, darmawisata, olahraga dan seni dengan menggunakan agama Islam sebagai alatnya; (4) meningkatkan kemajuan jasmani dan rohani anggotanya dengan jalan menahan diri dan sabar.<sup>22</sup>

Di lingkungan JIB, Natsir juga memberi ceramah dan pelajaran agama Islam dan itu disampaikan dalam bahasa Belanda agar

mendapat perhatian dari para pemuda-pemudi yang merasa dirinya kaum intelektual dan kaum terpelajar.<sup>23</sup> Aktivitas dalam JIB menjadi sangat penting karena dua hal, yaitu pertama, JIB telah menjadi suatu perkumpulan yang mempunyai ikatan tersendiri bagi pemuda-pemuda yang mempunyai latar belakang Islam yang menempuh pendidikan Barat. Kedua, JIB juga menjadi sebuah tempat yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi.<sup>24</sup>

Organisasi kedua yang turut mempengaruhi perkembangan pemikiran Natsir adalah organisasi Persis. Persis memiliki pengaruh yang dominan dalam pembentukan kepribadian Natsir yang berwawasan Islam modern. Sebab dalam organisasi ini, salah satunya adalah akibat kedekatannya dengan A. Hassan.<sup>25</sup> Ada dua alasan yang menyebabkan ia sangat tertarik untuk belajar dengan A. Hassan. Pertama, A. Hassan sangat menguasai tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat muslim saat itu. Kedua, pendekatan A. Hassan terhadap kajian Islam sangat atraktif bagi generasi muda muslim, yang dengan cara demikian, sangat berbeda dengan yang digunakan oleh para ulama lainnya.<sup>26</sup>

<sup>20</sup>Waluyo, *Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan Nasional*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 18.

<sup>21</sup>Yusril Ihza Mahendra, "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Natsir", dalam *Islamika*, Nomor 3, Januari-Maret, 1994, hlm. 65.

<sup>22</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Prespektif Modernis da Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. 184.

<sup>23</sup> Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), hlm. 182.

<sup>24</sup> Lukman Hakiem, *M. Natsir Di Panggung Sejarah Republik*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2008), hlm. 124.

<sup>25</sup> Kamaruzzaman, *op. cit.*, hlm 183

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

Kehidupan pendidikan Barat dan pengaruh modernisme Islam membuat Natsir menjadi orang yang cukup produktif dalam membuat karya tulis. Karya tulis mayoritas berupa artikel yang bermuatan agamis dan politis. Karya-karya tersebut banyak berupa artikel bebas di majalan-majalah seperti Pembela Islam, Aliran Islam, *Het Licht*, Suara Partai Masyumi. Beberapa karya tulis Natsir pada periode 1930-1960 di antaranya adalah *Capita Selecta 1*, *Capita Selecta 2*, Islam dan Kristen di Indonesia, Islam sebagai Ideologi, *Kom Tot Het Gebed* (Marilah Shalat), Agama dan Negara, Falsafah Perjuangan Islam, *Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs* dan Fiqh Dakwah.

### **B. Pandangan Mohammad Natsir Tentang Tujuan Berpolitik**

Islam dimaknani oleh Natsir bukan hanya sebatas peribadatan saja, namun pengertian Islam secara lebih luas meliputi semua kaedah-kaedah, batasan-batasan, dalam pergaulan di masyarakat yang telah ditetapkan oleh Islam.<sup>27</sup> Maka dari itulah Natsir menganggap universalitas Islam merupakan dasar yang kuat bahwa Islam dapat dijadikan pedoman dan tujuan dalam kehidupan politik suatu bangsa.<sup>28</sup>

Natsir selalu mengutip ayat Alqur'an yang dianggapnya sebagai dalil pokok kewajiban

manusia di muka bumi: "Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan pada-Ku". Dengan berdasar pada ayat ini, maka Natsir berpendapat bahwa segala aktivitas kehidupan manusia haruslah bermuara pada peribadatan kepada Tuhan. Begitupa dalam tujuan mendirikan sebuah negara, menurut Natsir bukanlah sebagai tujuan utamanya, tetapi hanyalah alat yang menjamin supaya aturan-aturan yang terdapat dalam Alqur'an dan sunah Nabi Muhammad Saw. Dalam kehidupan dunia hingga lam baka.<sup>29</sup>

Cita-cita mendirikan negara dan berpolitik bagi kaum muslim itu bukanlah cita-cita yang terakhir. Negara bagi umat Islam bukanlah suatu batas akhir dari perjuangan. Negara hanyalah alat bagi menyempurnakan berlakunya hukum Tuhan untuk keselamatan dan kesentosaan manusia. Perjuangan kaum muslim baru berakhir, apabila telah tercapai cita-cita terakhir yaitu ampunan Tuhan, yang diibaratkan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*, negara yang makmur dan berada dibawah ampunan Tuhan.<sup>30</sup>

### **C. Sistem Pemerintahan Islam Menurut Mohammad Natsir**

Islam tidak memberikan bentuk baku mengenai sistem kepemimpinan dalam sebuah negara. Berkaitan dengan hal ini, Natsir menganggap bahwa sistem Khilafah bukan satu-satunya sistem yang menjadi rujukan umat Islam

---

<sup>27</sup> Mohammad Natsir, *Capita Selecta 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 436.

<sup>28</sup> Septian Prasetyo, "Pemikiran Mohammad Natsir dalam Ideologisasi Islam di Indonesia Tahun 1949-1959", *Antara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, No. 2, Vol. 3, edisi Juli, tahun 2015.

<sup>29</sup> Mohammad Natsir (1954), *op.cit.*, hlm. 442.

<sup>30</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Ideologi*, (Jakarta: Pustaka Aida, 1950), hlm. 36.

untuk menyelenggarakan proses bernegara. Natsir tidak mengharuskan secara khusus memakai gelar Khalifah, presiden, atau Amirul Mukminin. Hal terpenting mengenai proses kepemimpinan dalam Islam adalah sanggup bertindak bijaksana dan menerapkan peraturan-peraturan Islam dengan semestinya dalam susunan kenegaraan.<sup>31</sup> Lebih lanjut lagi Natsir menyampaikan bahwa Islam tidak kenal kepada kepala negara seperti Paus atau *Patriarch*. Kepala negara yang bernama Islam, yang harus dijalankan oleh kaum Muslimin, dan harus dipelihara dan dijaga supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa yang menjadi kriteria utama bagi seorang pemimpin adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya, bukan bangsa dan keturunannya atau semata-mata intelektualnya saja. Negara yang berasaskan Islam bukan negara yang kerajaan yang diwariskan secara turun temurun dan membatasi kekuasaan hanya pada satu keluarga saja. Anak mewarisi kekuasaan dari bapak, dan cucu mewarisinya dari kakek, seperti mewarisi harta kekayaan dan bangunan, walaupun yang menerima itu termasuk orang yang paling bodoh dan paling bejat moralnya.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan sistem kenegaraan, Natsir bersepakat untuk menggunakan sistem demokrasi Islami dalam pelaksanaannya di Indonesia yang. Konsep ini juga dikenal dengan nama *Theistic Democracy*. Konsep ini memiliki pengertian bahwa demokrasi haruslah dijiwai dan berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam. Pengertian demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat supaya mengeritik, menegur, membetulkan pemerintahan yang dzalim. Kalau tidak cukup dengan kritik dan teguran, Islam memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan bila perlu.<sup>34</sup>

Konsep Natsir tentang demokrasi memiliki kemiripan dengan pemikiran Maududi Maududi. Dalam sistem Teo-Demokrasi ini manusia yang menjalankan tugas sebagai politikus yang masih dalam koridor aturan agama yang telah diberikan oleh Tuhan. Dalam sistem Teo-demokrasi, kaum muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan Tuhan.<sup>35</sup>

Konsekuensi dari prinsip demokrasi itu jika dipakai untuk membentuk sebuah negara adalah bahwa hal pertama yang harus dilakukan oleh negara tersebut ialah mencerminkan objek yang ada di negara tersebut, terutama falsafah hidup sebagian besar mayoritas rakyatnya. *Kedua*, prinsip-prinsip tersebut mengharuskan

<sup>31</sup> Mohammad Natsir (1954), *op.cit.*, hlm. 447.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 459.

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawiy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 51

<sup>34</sup> Mohammad Natsir (1954), *loc.cit.*, hlm. 439.

<sup>35</sup>Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Jakarta, Bandung: Mizan, 1998), hlm. 160.

memberikan ruang hidup bagi golongan-golongan yang berpendapat lain dari mayoritas. Kedua prinsip ini saling memiliki keterkaitan, yang satu tak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga apabila hanya satu dari dua yang dipakai, maka hal itu tidak bisa dinamakan demokrasi lagi tetapi diktatur atau tirani atau oligarki.<sup>36</sup> Natsir mengemukakan bahwa menyangkut umat Islam, demokrasi adalah yang pertama, sebab Islam hanyalah mungkin berhasil dalam suatu sistem yang demokratis.<sup>37</sup> Mengenai implementasi demokrasi dalam Islam, Natsir hanya menekankan pada prinsip *syura* (musyawarah), sedangkan bagaimana teknisnya disesuaikan dengan ijtihad umat Islam.<sup>38</sup>

Meskipun Natsir menganggap demokrasi adalah sistem yang baik, namun ia menolak penggunaan demokrasi untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan sesaat, seperti yang pernah disampaikan Soekarno tentang keinginannya untuk mengubur partai. Langkah ini dianggap sebagai langkah untuk mengubur juga proses demokratisasi. Logikanya, menurut Natsir, jika sarana itu dihilangkan maka musnahlah proses demokrasi di Indonesia. Natsir juga menganggap langkah itu sebagai awal dari kediktatoran seorang Soekarno yang sama sekali tidak sesuai dengan prinsip politik Islam.

Dengan kondisi yang demikian, Natsir berpendapat bahwa yang seharusnya dilakukan

bukanlah dengan mengubur partai yang dianggap penyakit. Jalan yang harus ditempuh dengan kondisi partai semacam ini adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Oleh karena demokrasi dengan mengubur partai adalah bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam Islam, maka Natsir menolak ide tersebut.

#### **D. Implementasi Etika Politik Islam dalam Kehidupan Mohammad Natsir**

Tindakan seseorang merupakan buah dari pemikiran yang ada pada diri orang tersebut. Begitupula untuk melihat riil pemikiran etika yang disampaikan oleh Natsir, maka diperlukan menelaah aktivitas politiknya dalam kehidupan sehari-harinya. Kehidupan politik Natsir dimulai ketika ia bergabung dengan KNIP sebagai pengganti sementara MPR. Pada masa revolusi fisik, ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan hingga Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada 1950.

Peranan Natsir lebih spesifik dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi dan dasar negara ia wujudkan dengan mendirikan Partai Masyumi bersama organisasi Islam yang lain. Masyumi dideklarasikan di gedung sekolah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada 7-8 November 1945, yang bertepatan pada tanggal

---

<sup>36</sup> Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara: Pidato Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante pada tanggal 12 November 1957*, Pimpinan Fraksi Masyumi.

<sup>37</sup> Kahin, "Mohammad Natsir", dalam Yusuf Puar Abdullah (ed.), *Muhammad Natsir* 70

*Tahun Kenang-Kenangan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Aksara, 1978), hlm. 333.

<sup>38</sup>Mohammad Natsir, "Agama dan Negara" dalam Isa Anshary, *Falsafah Perjuangan Islam*, (Medan: Saiful, 1951), hlm. 261-285.

1-2 Dzulhijjah 1364 Hijriyah.<sup>39</sup> Dalam kongres tersebut, Natsir berposisi sebagai ketua panitia dengan beranggotakan Sukiman, Abikusno, Wahid Hasjim, Wali al Fatah, Sri Sultan Hamengku Buwana IX, Sri Paduka Paku Alam VIII dan A. Gafar Ismail.<sup>40</sup> Tujuan Masyumi dapat dilihat di AD/ART Masyumi yaitu menegakkan kedaulatan republik Indonesia dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.<sup>41</sup> Tujuan ini tidak terlepas dari upaya untuk mempertahankan Indonesia dari kesewenang-wenangan bangsa Belanda di Indonesia yang diperkirakan akan menjajah untuk kedua kalinya,<sup>42</sup> serta sebagai saranan untuk memimpin perjuangan umat Islam di Indonesia.<sup>43</sup>

Natsir terlibat dalam berperan aktif dalam perjuangan Islam sebagai ideologi negara yang luhur. Masyumi pernah menjadi partai oposisi terhadap Kabinet Ali II. Natsir mengatakan bahwa Masyumi menjadi oposisi yang berdasarkan ajaran Allah Swt. Natsir mengeluarkan seruan umum kepada seluruh

keluarga besar Masyumi agar tetap menjalankan kegiatan politik sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Natsir menghimbau untuk tetap menjalin silaturahmi dan persaudaraan sesama muslim, sambil terus meningkatkan kualitas organisasi dari yang sudah-sudah.<sup>44</sup>

Natsir mencoba untuk merumuskan beberapa pandangan tentang konsep Tauhid yang ingin ia jadikan sebuah asas dalam Majelis Konstituante. Natsir mengungkapkan bahwa “Tauhid yang berarti percaya akan adanya Tuhan yang diagungkan, menjebakkan rakjat kita dalam diri masing-masing menjimpan ketaqwaan kepada Tuhan”.<sup>45</sup> Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kehidupan manusia pada dasarnya adalah beribadah kepada Tuhan, maka selayaknya hukum Tuhan-lah yang seharusnya digunakan sebagai dasar dalam segala aktivitas. Dengan hanya berhukum pada hukum Tuhanlah manusia sudah memosisikan dirinya sebagai insan yang bertaqwa, menumbuhkan asas-asas etika yang utuh sehingga melepaskan diri dari ketergantungan kepada manusia.<sup>46</sup>

<sup>39</sup> Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 49.

<sup>40</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 110.

<sup>41</sup> AD/ART Masyumi.

<sup>42</sup> *Kedaulatan Rakyat*, 7 November 1945.

<sup>43</sup> Remy Madinier, *Partai Masyumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm 67.

<sup>44</sup> Masyumi memilih untuk menjadi partai oposisi pemerintah. Namun sebagai ketua

Masyumi, Natsir menghimbau untuk tetap menjaga cita-cita luhur Masyumi sebagai partai politik yang memperjuangkan Islam. Lihat lampiran ANRI, “Seruan Mohammad Natsir kepada Seluruh Anggota Masyumi Tentang Kedudukannya sebagai Oposisi”, ANRI, *Arsip Sekneg KPM 1950-1959 Nomor 1857*.

<sup>45</sup> Anonim, “Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante”, dalam *Risalah perundangan Konstituante Republik Indonesia Jilid 1*, (tanpa penerbit: tanpa Tahun), hlm. 124.

<sup>46</sup> Yusril Ihza Mahendra, “Modernisme Islam dan Demokrasi”, dalam *Islamika*, No.3, Januari-Maret, 1994, hlm. 67.

Agama merupakan pedoman manusia untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya, termasuk dengan politik yang harus menggunakan agama sebagai dasar pergerakannya.<sup>47</sup> Oleh karena itulah Natsir menginginkan bahwa Islam digunakan sebagai dasar Negara sesuai dengan konsep universalitasnya. Natsir juga menolak Pancasila sebagai dasar negara dengan berdalil bahwa untuk sebuah dasar negara, Indonesia hanya memiliki dua pilihan, yaitu sekulerisme atau Islam. Natsir menganggap Pancasila adalah produk sekuler karena Pancasila tidak bersumber dari Tuhan dan hanya penggalian dari masyarakat.<sup>48</sup>

## KESIMPULAN

Etika politik Islam dalam kajian ilmu politik berfungsi untuk melihat baik buruknya politik itu dilaksanakan sesuai dengan sudut pandang Islam. Kajian etika politik menekankan pada 3 pembahasan utama, yaitu *pertama* mengenai tujuan politik, *kedua* mengenai sarana yang digunakan dalam berpolitik, dan *ketiga* mengenai aksi politik seorang politikus. Pemikiran Natsir mengenai etika politik Islam tahun 1930-1960 dapat dipetakan menjadi beberapa pokok. *Pertama*, Natsir menjadikan politik sebagai sarana untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi demi terwujudnya negara yang *baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*. Ia meyakini bahwa negara dan Islam saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara

dalam hal penegakkan hukum-hukum yang tertera dalam agama, yang secara eksplisit tercantum dalam Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Pokok pikiran **kedua** mengenai sarana yang harus digunakan dalam konsep bernegara. Natsir mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia. Menurutnya, Islam adalah agama yang demokratis dengan penjaminan hak-hak individu dan persamaan di antara manusia. Selain itu, irisan-irisan antara demokrasi dan Islam dalam hal persamaan, kebebasan, dan keadilan yang diselenggarakan dengan sistem musyawarah merupakan jaminan bahwa Islam bukan termasuk agama yang otoriter. Pokok pikiran **ketiga** mengenai implementasi pemikiran tersebut dalam bentuk aktivitas politik kenegaraan. Sebagai sarana untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia, Natsir bersama dengan organisasi Islam yang ada mendirikan Masyumi pada November 1945. Partai ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh umat Islam dalam menyuarkan aspirasi sebagai seorang warga negara.

Natsir juga bertindak sebagai seorang juru damai dalam permasalahan DI/TII. Sebagai seseorang yang memegang prinsip Islam, ia mengupayakan untuk menjadi pihak yang menengahi konflik antara pasukan DI/TII dan pemerintahan Soekarno. Natsir memilih menggunakan pendekatan diplomatik dan persuasif daripada menggunakan pendekatan

---

<sup>47</sup> Deliar Noer, (1987), *op.cit.*, hlm. 134.

<sup>48</sup>Mohammad Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Pimpina Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957), hlm. 12.

militer yang represif Karena baginya pasukan DI/TII juga termasuk masyarakat yang ikut membantu dalam mengusir penjajah pada saat terjadi agresi militer. Selain itu, Natsir menganggap bahwa langkah militer yang ditempuh pemerintahan Soekarno merupakan tindakan yang salah dan dianggap diboncengi kepentingan PKI sehingga menimbulkan banyak korban bagi umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip

AD/ART Masyumi.

ANRI, "Keterangan Dewan Pimpinan Partai Masyumi", dalam *Arsip Sekneg KPM 1950-1959 Nomor 1817*.

ANRI, "Seruan M. Natsir Kepada Anggota Masyumi tentang Kedudukan sebagai Partai Oposisi", *Arsip Sekneg KPM 1950-1959 Nomor 1857*.

### Sumber Surat Kabar

"Budaya Minangkabau di Era Globalisasi", *Republika*, 13 Januari 1996.

*Kedaulatan Rakyat*, 7 November 1945.

"Minangkabau Penghasil Demokrasi, Intelektual Religius dan Figur Antikolonial", *Panji Masyarakat*, No. 837, 21-31 Agustus 1995.

### Sumber Buku

Abd Rahman Wahid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2011).

Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: Sipes, 1994).

Abu A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Jakarta, Bandung: Mizan, 1998).

Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2002).

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1987).

Ahmad Zainal Abidin, *Masjoemi: Partij Politiek Islam Indonesia*, (Pematang Siantar, 1946).

Ajip Rosidi, *Natsir: Sebuah Biografi*, (Jakarta: Giri Mukti Pasaka, 1990).

Anonim, "Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante", dalam *Risalah perundangan Konstituante Republik Indonesia Jilid 1*, (tanpa penerbit: tanpa Tahun).

Artani Hasbi, *Musyawahar & Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014),.

Dadan Wildan, *Yang Da'i Yang Politikus: Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997).

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003).

Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).

Helius Syamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007).

- Hendra Gunawan, *M. Natsir dan Darul Islam: Studi Kasus Aceh dan Sulawesi Selatan Tahun 1953-1958*, (Jakarta: Media Dakwah, 2000).
- Ibn Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syariyyah fi Islah al-Rayi wa al-Raiyyah*. (Bairut: Dar al-Aflaq al-Jadidah, 1988).
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *At Thuriq Al-Hukmiyyah Fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al Hadits, 2002).
- Imam Al Mawardi, *Hukum dan Tata Negara Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Isa Anshary, *Falsafah Perjuangan Islam*, (Medan: Saiful, 1951).
- Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005).
- Kahin, "Mohammad Natsir", dalam Yusuf Puar Abdullah (ed.), *Muhammad Natsir 70 Tahun Kenang-Kenangan dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Aksara, 1978).
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Prespektif Modernis da Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropolgi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.159-160.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Tiara wacana, 1994).
- Lukman Hakiem, *M. Natsir Di Panggung Sejarah Republik*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2008).
- Masyaruddin, *Pemberontakan Tasawuf : Kritik Ibnu Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf*, (Surabaya: STAIN Kudus Press, 2007).
- Mochtar Naim, "Budaya Minangkabau di Era Globalisasi", *Republika*, 13 Januari 1996.
- Mohammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 8.
- Mohammad Elvandi, *Inilah Politikku*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011).
- Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Ideologi*, (Jakarta: Pustaka Aida, 1959).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali, 1973).
- \_\_\_\_\_, "Capita Selecta II", (Jakarta: Pustaka Pendis, 1958).
- \_\_\_\_\_, *Capita Selecta I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).
- \_\_\_\_\_, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Pimpina Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995).
- Nugroho Notosusanto, *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1971).
- Remy Madinier, *Partai Masyumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*, (Bandung: Mizan, 2013).
- Sidi Gazalba, *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bhatara, 1996).
- Solihin Salam, *Wajah Nasional*, (Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam, 1990).
- Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Waluyo, *Dari "Pemberontak" Menjadi Pahlawan Nasional*, (Yogyakarta: Ombak, 2009).
- Yusuf Abdullah Puar, *Muhammad Natsir 70 Tahun: Kenang-kenangan Dan Perjuangan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1978).
- Yusuf Qardhawiy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Rabbani Press, 1997).

**Sumber Jurnal**

M. Amin Abdullah, “Ta’wil al-Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, dalam *al-Jamiah*, Vol. 39. No. 2, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

Septian Prasetyo, “Pemikiran Mohammad Natsir dalam Ideologisasi Islam di Indonesia Tahun 1949-1959”, *Antara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, No. 2, Vol. 3, edisi Juli, tahun 2015.

Yusril Ihza Mahendra, “Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Natsir”, dalam *Islamika*, Nomor 3, Januari-Maret, 1994.

Yogyakarta, 4 April 2018

Dosen Pembimbing TAS

Reviewer

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag  
NIP. 19620321 1989031 1 001

Dr. Miftahudin, M. Hum  
NIP. 19740302 200312 1 006

